

ABSTRAK

Arpani Yureza Pratama Nim 1213020025: Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Masjid Raya Bandung

Masjid Raya Bandung (MRB) mengintegrasikan fungsi ibadah dan wisata yang idealnya dikelola berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) antara idealisme fatwa (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) di lapangan, khususnya terkait jaminan halal dan adab publik yang berakar pada fragmentasi otoritas pengelolaan.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis mekanisme pengelolaan eksisting; (2) mendeskripsikan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 terhadap mekanisme tersebut; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya.

Kerangka berpikir penelitian menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan *Maslahah Mursalah*, dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 sebagai pisau analisis untuk mengukur kesenjangan implementasi pada tata kelola eksisting.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Nazir Wakaf, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, mekanisme pengelolaan terfragmentasi (*fragmented authority*) antara Nazir Wakaf (area internal) dan Pemkot Bandung (area eksternal). Kedua, implementasi fatwa belum terlaksana secara menyeluruh, sukses di internal namun tidak efektif di eksternal karena Pemkot menggunakan standar Perda (sipil) bukan Fatwa (syariah), menyebabkan ketiadaan jaminan halal. Ketiga, faktor pendukung utama adalah status ikonik MRB, sedangkan penghambatnya adalah dualisme otoritas dan gangguan keamanan (premanisme) yang memicu praktik *gharar* dan *zhulm*.